

Collaborative Governance Dalam Program Corporate Social Responsibility Eliminasi Tuberkulosis

Oleh:

¹ Raka Distia Rizqi; ² Ananta Prathama

^{1,2}. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail. rakarizki76@gmail.com; prathama.ananta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Pemerintah dapat menjadikan *Collaborative Governance* sebagai jawaban atas kompleksitas masalah yang tengah ditangani dengan melibatkan lintas sektor swasta atau stakeholder terkait, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan melaksanakan kebijakan dan program publik seperti program *Corporate Social Responsibility Eliminasi Tuberkulosis* di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Gresik, dengan sasaran penelitian terdiri dari unsur pemerintah, unsur swasta, LSM atau NGO, dan masyarakat. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan Proses kolaborasi melibatkan pembagian sumber daya, keahlian, dan pengetahuan di antara para pemangku kepentingan, yang menghasilkan program yang lebih komprehensif dan efektif. Studi ini menyimpulkan bahwa kerjasama yang efektif antar pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan program CSR, khususnya dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat seperti penyakit TB. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Kondisi awal, Adanya forum terbatas, FGD, Kepemimpinan fasilitatif, kolaborasi telah berjalan berdasarkan partisipasi, aturan dasar dan transparansi pada program CSR Eliminasi TB telah terimplementasi dengan baik.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility; Tata kelola pemerintahan; Stakeholder

Abstract

This research aims to explain how Collaborative Governance serve as a solution to the complex problems being addressed the government by involving stakeholders from various sectors and prioritizing consensus and consultation in the decision-making process in order to execute public policies and programs such as the Corporate Social Responsibility Elimination of Tuberculosis program in Gresik Regency. The research methodology used in this study is a descriptive qualitative approach. The research location is in Gresik Regency and the research targets include government officials, private sector representatives, NGOs, and members of the community. The informants were selected using purposive and snowball sampling techniques and the data analysis method used was interactive analysis. According to the research findings, the collaboration process involves the distribution of resources, expertise, and knowledge among stakeholders, leading to a more comprehensive and effective program. This study emphasizes that effective collaboration among stakeholders is critical to the success of CSR programs, especially in addressing public health issues such as TB. After analyzing the data collected, it was discovered that the collaboration process was based on participation, fundamental rules, transparency, limited forums, FGD, and facilitative leadership, and these factors contributed to the successful implementation of the TB Elimination CSR program.

Keywords: Collaborative Governance; Corporate Social Responsibility; Stakeholder

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara biasanya diringi dengan pesatnya berkembangnya perekonomian. Sementara berkembangnya perekonomian selalu disokong oleh perkembangan kawasan perindustrian, yang berbarengan membawa transformasi dan pertumbuhan yang lebih luas di segala lini, seperti dalam bidang perdagangan dan perniagaan. Dalam jangka panjang, perkembangan ekonomi dengan memanfaatkan sektor perindustrian pada suatu negara akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara dan masyarakat, yaitu transisi serta transformasi dari ekonomi tradisional yang didominasi oleh pertanian ke ekonomi modern yang didominasi oleh perindustrian. (Tambunan, 2001)

Industri atau Pabrik pasti membutuhkan masyarakat sekitar untuk perkembangan perusahaan itu sendiri dan sebaliknya warga sekitar membutuhkan perusahaan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah melalui keberadaan perusahaan. Maka dari itu, tidak dapat dimungkiri bahwasanya kegiatan perindustrian memberikan dampak ekonomi bagi daerah sekitarnya. Proses industrialisasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup pada tingkat yang lebih tinggi (Arsyad, 2010). Pembangunan kawasan industri berdampak positif bagi kehidupan manusia, Karena hakikat pembangunan kawasan industri akan selalu memiliki arti bagi perkembangan peradaban manusia, dan lebih khusus lagi, pembangunan kawasan industri akan selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menperin menyampaikan dalam (Kemenperin, 2018). Wilayah perindustrian terbesar telah tersebar di sebagian kota dan kabupaten, seperti: Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, dan Tuban. (Republik Indonesia, 2019). Kehadiran berbagai industri di Kabupaten Gresik telah mengakibatkan pencemaran udara. Menurut pernyataan Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur, Kabupaten Gresik memiliki skor kualitas udara yang paling buruk di provinsi Jawa Timur, yaitu 65,81. BLH tersebut telah melakukan pengukuran kualitas udara di Kabupaten Gresik, meliputi daerah pemukiman, kawasan industri, dan lalu lintas. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa Gresik tercemar oleh debu dan telah melampaui standar kualitas udara ambien yang ditetapkan. (Beritajatim, 2021)

CSR secara umum bukan saja dimaknai sebagai sebuah kegiatan derma atau karitatif atau sikap sukarela yang dilaksanakan para pelaku usaha industri. Akan tetapi, paradigma baru CSR mengarah pada sebuah bentuk komitmen para pelaku usaha industri, dalam melaksanakan tanggung jawab atau timbal balik (*feedback*) kepada warga sekitar serta lingkungan. Elkinton (Susanto, 2009) menjelaskan definisi dari CSR bahwasanya sebuah perindustrian yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (profit), masyarakat (people), serta lingkungan hidup (planet).

Menurut WBCSD (Development, 1999), "*Corporate Social Responsibility (CSR) is continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life the workforce and their families as well as of the local community and society at large*", yang berarti bahwa

Corporate Social Responsibility (CSR) Dunia usaha berkomitmen untuk menjunjung tinggi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang melibatkan menjaga praktik etis, patuh pada regulasi hukum, dan secara aktif berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, sambil mempromosikan standar kehidupan yang lebih baik bagi karyawan dan keluarganya, serta memajukan kualitas hidup secara keseluruhan di komunitas lokal dan masyarakat secara luas.

Wakil Bupati Gresik, Hj Aminatun Habibah, mengungkapkan apresiasi atas upaya PT. Smelting dalam memberantas pasien TB di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk bekerja sama dalam mencapai eliminasi TB nol persen di Kabupaten Gresik pada tahun 2028, dan secara nasional pada tahun 2030. PT. Smelting telah bekerja sama dengan Human Initiative untuk memberikan dukungan dalam upaya eliminasi pasien TB sejak awal. PT. Smelting juga telah mendukung proses eliminasi TB yang dimulai sejak tahun 2019. Tahun ini, yaitu 2022, menandai tahun ketiga inisiatif yang diambil oleh Human Initiative (HI) dan PT. Smelting untuk memberantas TB. Berdasarkan berita diatas PT. Smelting melakukan kerjasama dengan Human Initiative sebagai eksekutor program CSR.

Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian Proses *Collaborative Governance* Dalam pelaksanaan program CSR PT. Smelting terdapat Kader TB (*civil society*) yang memiliki tugas sebagai pendamping (*field fasilitator*). Dinas Kesehatan Gresik (Dinkes) Kabupaten Gresik yang memberi ijin selaku pihak pemerintah (*government*). Human Initiative (*Non Governmental Organization*) selaku eksekutor program yang memiliki tanggung jawab sebagai field fasilitator serta perusahaan PT. Smelting Gresik dari pihak swasta (*private sector*). Pihak yang bersangkutan tersebut telah mempunyai tugas tersendiri yang telah tercantum pada Laporan Program CSR PT. Smelting Peduli Pasien Tuberkulosis (TB). Secara lebih luas, *Collaborative Governance* adalah pendekatan dalam pengelolaan pemerintah yang melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan yang berfokus pada pencapaian konsensus dan konsultasi bersama dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan program publik (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020)

(Ansell & Gash, 2008) Ansell menjelaskan *Collaborative Governance* adalah pengaturan pengendalian di mana satu atau lebih lembaga publik dan pemangku kepentingan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, bertujuan untuk membuat atau menetapkan kebijakan publik, dan mengelola program atau aset publik. Definisi tersebut menekankan tujuh kriteria penting, yaitu: (1) Ada publik, privat, dan komunitas; (2) aktor non-negara berpartisipasi; (3) Pendapatan meningkat; (4) pembangunan infrastruktur; (5) Secara resmi diselenggarakan dan bertemu secara kolektif; (6) mufakat; dan (7) Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik.

Namun, perbedaan dalam penelitian ini nantinya akan lebih mengerucut pada praktik CSR yang melibatkan sinergitas serta kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat. Sehingga, selanjutnya, penelitian ini akan melihat lebih jauh mengenai

pelaksanaan program CSR dengan perspektif Collaborative Governance. Dengan terbentuknya sinergitas antar pihak Stakeholders dalam Program CSR maka diharapkan program tersebut lancar. Dalam kegiatan CSR Eliminasi TB di Kecamatan Roomo Kabupaten Gresik berlandaskan pada beberapa peraturan yang mendukung adanya kerjasama. Peraturan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Gresik.

Forum *Collaborative Governance* menjadi penting untuk dibentuk di Kabupaten Gresik yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, LSM dan ormas, serta media massa yang berkolaborasi dalam mendukung Eliminasi TB melalui CSR. Dengan terbentuknya praktik *Collaborative Governance* pada program CSR PT. Smelting Gresik di Kabupaten Gresik sebagai pelaksana Program CSR didampingi Human Initiative, maka dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten Gresik mulai melaksanakan kegiatan *Collaborative Governance*. Berdasarkan pemikiran dan permasalahan tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk menjalankan penelitian proses *Collaborative Governance Corporate Social Responsibility Eliminasi TB* Kabupaten Gresik. Untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah dapat menjadikan Collaborative Governance sebagai jawaban atas kompleksitas masalah yang tengah ditangani dengan melibatkan lintas sektor swasta atau stakeholder terkait, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan melaksanakan kebijakan dan program publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah Jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang melibatkan penggunaan data kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Seperti yang dikutip oleh (Dr.farida Nugrahani, 2014) dari Krik dan Miller, metode penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam lingkungan mereka sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Menurut (Anggara, 2015), metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian naturalistik karena penelitian bertujuan untuk memeriksa kondisi alami. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik. Lokus ini dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu yang membuat peneliti tertarik, yaitu memberikan bantuan berupa CSR dan mendapatkan CSR Award dari Bupati Gresik di Kabupaten Gresik, program CSR PT. Smelting dinobatkan menjadi Partisipasi Aktif Dalam Pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2019 hingga 2022 Melalui Koordinasi dan Pelaporan CSR. Penelitian ini dengan maksud ingin memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang Proses *Collaborative Governance Program CSR Eliminasi TB* Kabupaten Gresik oleh PT. Smelting Gresik. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup data utama yang dikumpulkan langsung dari lapangan, seperti dari narasumber atau informasi yang diperoleh dari wawancara dengan informan terkait penelitian (Dr.farida Nugrahani, 2014). Di sisi lain, data sekunder berfungsi sebagai sumber data tambahan

yang diambil tidak langsung dari lapangan tetapi dari sumber yang dibuat oleh orang lain, seperti dari buku, dokumen, foto, dan statistic (Dr.farida Nugrahani, 2014). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati secara langsung segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder terkait pelaksana CSR Eliminasi TB dan masyarakat Kabupaten Gresik terkait dengan program CSR PT. Smelting. Sedangkan, untuk wawancara dilaksanakan bersama Penanggung Jawab CSR TB PT. Smelting Kabupaten Gresik, Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Human Initiative, serta Keluarga Penerima Manfaat Program CSR Eliminasi TB. Maka, untuk memperkuat hasil penelitian diperlukan juga dokumentasi penelitian yang didapatkan melalui data secara langsung maupun tidak langsung dari informan yang terkait dengan penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama program kegiatan CSR Eliminasi TB terdapat beberapa pihak yang terlibat diantaranya yakni PT. Smelting, Human Initiative, Dinas Kesehatan Gresik, dan Kader TB. Kegiatan CSR Eliminasi TB merupakan kegiatan yang dibuat oleh PT. Smelting dan Human Initiative bersama dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Gresik No.37 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis Di Kabupaten Gresik. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Smelting Peduli Pasien Tuberculosis (TB) di Kantor Kecamatan Bungah, Kamis (21/4/2022). Ini merupakan kegiatan rutin yang digelar PT. Smelting bersama Human Initiative. Proses eliminasi TB ini didukung PT. Smelting yang di inisiasi sejak 2019. Tahun ini 2022 merupakan tahun ketiga Human Initiative (HI) dan PT. Smelting menginisiasi TB. Targetnya yakni 150 pasien. Di antaranya diberi makanan tambahan bergizi untuk tingkatkan imunitas tinggi. Pada awal kegiatan dimulai, banyak warga yang menyembunyikan gejala TB kepada Dinas terkait yang terlibat. Setelah dilakukan Sosialisasi besar-besaran oleh PT. Smelting, Human Initiative, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik mulai bermunculan para pasien pengidap atau teridentifikasi TB di Kabupaten Gresik, para kader kesehatan menemukan 230 pasien dari jumlah total yang ingin dicapai Dinas Kesehatan 3000 pasien.

Berdasarkan dengan rumusan masalah dari penelitian, fokus pada penelitian ini adalah mengenai untuk mengetahui mengenai bagaimana Proses *Collaborative Governance* Program *CSR Eliminasi TB* Kabupaten Gresik oleh PT. Smelting yang dilakukan oleh PT. Smelting Kabupaten Gresik, dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* Ansell and Gash yang memiliki empat indikator program dalam keberhasilan suatu program. Indikator tersebut adalah:

Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan gambaran kondisi para stakeholder sebelum mengikuti kolaborasi, dengan kata lain kondisi awal berpotensi untuk mendorong adanya kolaborasi atau kerjasama. Menurut Ansell dan Gash dalam (Habibah, 2021) kondisi awal memiliki tiga kriteria yakni sumber daya, *Incentives to participates*, dan *Prehistory of antagonism and cooperation*.

Banyaknya industri tersebut yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara di Kabupaten Gresik. Adanya polusi udara yang menyebabkan tingginya penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Gresik. Munculnya kesadaran bahwa kegiatan produksi perusahaan secara tidak langsung berdampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik di area kegiatan produksi industri telah membuat beberapa perindustrian merasakan pentingnya kegiatan sosial. Kegiatan yang bersifat sosial pada akhirnya dijadikan sebagai kegiatan wajib bagi perusahaan yang banyak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan sosial ini disebut tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*.

Dalam *collaborative governance* sebelum menjalin kerjasama atau kolaborasi, pasti terdapat ketidakseimbangan sumber daya antar stakeholder. Adapun ketidakseimbangan sumber daya yang dimaksud ialah ketersediaan sumber keuangan, sumber daya teknis, dan sumber daya lainnya. PT. Smelting Sebelum menginisiasi dan mengikuti kolaborasi ini dalam membantu pendampingan pasien TB, mereka melakukannya dengan memulai kegiatan sosialisasi dan melakukan pembentukan bersama kader TB. Kondisi masyarakat masih sangat awam mengenai bahaya, dampak dan kesembuhan dari penyakit TB itu sendiri sebelum adanya program kolaborasi ini dan Peraturan Bupati Gresik No.37 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis Di Kabupaten Gresik. Sedangkan dari pihak lintas sektoral sebelum mengikuti kolaborasi yakni PT. Smelting dan Human Initiative cukup sulit dalam menemukan pasien pengidap TB dikarenakan banyaknya masyarakat yang takut untuk melakukan pemeriksaan diri ke fasilitas kesehatan yang ada. Para Stakeholder juga terbantu dengan adanya aturan tentang TB karena etika adanya Grand Desain Program, peraturan daerah yang sejalan dengan program maka berjalannya program sesuai dengan scope yang telah disepakati. Kondisi tersebut sama dengan yang dikemukakan (Molla et al., 2021) Kondisi awal bertindak sebagai pemicu bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memiliki keinginan untuk bekerja sama, tanpa memandang apakah mereka berasal dari pemerintah atau lembaga lain. Keinginan atau kebutuhan untuk berkolaborasi muncul ketika mereka telah berbagi pengalaman sukses dan tidak berhasil, yang mengarah pada rasa solidaritas melalui upaya kerjasama.

Umumnya partisipasi merupakan hak seluruh Stakeholder untuk terlibat dalam berkolaborasi. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri sebagian aktor yang berpartisipasi selalu memperhitungkan insentif (keuntungan) yang diperoleh dari keterlibatannya dalam *collaborative governance*. Dalam kolaborasi kegiatan CSR Eliminasi TB di Kabupaten Gresik, sebelum melaksanakan kolaborasi tersebut stakeholder ditawarkan hasil yang akan dicapai. Insentif untuk masyarakat telah disampaikan Dinkes Kabupaten Gresik pada saat sosialisasi. Keuntungannya berupa pertama bantuan, pendampingan, dan pelatihan, kedua adanya jaminan Sejalan dengan Perpres nomor 67 tentang TB, karena adanya keterlibatan lintas sektoral, serta dukungan pendanaan Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik sebagai perwujudan Corporate Social Responsibility dan (charity) dari pihak swasta.

Dalam proses collaborative governance pada kegiatan CSR Eliminasi TB di Kabupaten Gresik tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat masalah. Sebelum melaksanakan kolaborasi, Human Initiative khususnya para kader kesehatan kesulitan mencari ataupun mengajak para warga untuk mengikuti program ini. Bahkan mereka mensosialisasikannya secara berulang ulang. Kader Kesehatan Eliminasi TB sulit mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Alasan yang mendasari tidak inginnnya masyarakat mengikuti kegiatan tersebut ialah karena mereka berfikir bahwa penyakit TB ini tidak berbahaya dan menular. Hingga pada akhirnya awal kegiatan hanya diikuti oleh beberapa warga atau pasien TB dan mereka mendapatkan keuntungan. Namun setelah program tersebut berjalan pada kegiatan pertamanya banyak warga untuk mengikuti. Hal tersebut dipandang kembali oleh warga lain yang mengidap TB dan banyak dari mereka yang akhirnya turut mengikuti program tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa Prehistory of antagonism and cooperation pada kolaborasi kegiatan CSR Eliminasi TB di Kabupaten Gresik telah terimplemntasi dengan baik. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi awal pada program CSR Eliminasi TB di Kabupaten Gresik telah terimplementasi dengan baik.

Desain Kelembagaan

Sasaran kajian pada indikator ini adalah untuk mengetahui dan memastikan aturan dasar yang jelas dan telah disepakati bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Puskesmas, PT. Smelting, Human Initiative, dan Warga Sekitar selama kolaborasi berlangsung. Aturan dasar yang dijalankan berdasarkan kesetaraan peran dalam mengambil keputusan, forum terbatas yang terbentuk dalam proses kolaborasi, serta transparansi dari setiap pihak. (Ansell & Gash, 2008) mengatakan desain kelembagaan merupakan aturan dasar dari proses kolaborasi. Model Collaborative Governance dari (Ansell & Gash, 2008) pada indikator desain kelembagaan berdasarkan pada partisipasi (*Participatory inclusiveness*), forum terbatas (*Forum exclusiveness*), dan aturan dasar pendukung dan transparansi (*Clear grouns rules and process transparency*).

Stakeholder yang turut berpartisipasi dalam kolaborasi terdiri dari pemerintah, swasta, Non Government Organization dan masyarakat dimana partisipasi dibangun atas dasar kesetaraan peran. Pada program kegiatan CSR Eliminasi TB di Kabupaten Gresik partisipasi stakeholder ditunjukkan dari adanya Perijinan yang dibuat dan disepakati bersama. PT. Smelting dahulu mengadakan pertemuan dengan Human Initiative untuk merencanakan Grand Desingn Program CSR. lalu Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari PT. Smelting dan HI. Peran PT. Smelting sebagai mitra dalam kolaborasi ini, dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan serta bersedia menyediakan Pemberian Paket Gizi, Renovasi Ventilasi, Peningkatan kapasitas Kader, Pendampingan PHBS, Advokasi pasien, bersedia mendampingi pasien dari awal hingga akhir kegiatan. Sementara itu Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebagai penanggung jawab dalam kolaborasi ini, dengan tugasnya yang memberikan perijinan, mediator untuk PT. Smelting dan Human intitative pada masyarakat atau pasien TB Kab. Gresik, dan pembentukan Kader

Kesehatan pasien TB. Dan masyarakat dalam program ini sebagai penerima manfaat. Karena pasien yang mendapatkan manfaat kesembuhan dan mendapatkan keuntungan.



Gambar 1. Pelatihan Kader TB Kabupaten Gresik

Forum terbatas (*Forum exclusiveness*) disiapkan bagi stakeholder yang berinteraksi dan terdapat kategori pembahasan pada tiap forumnya. Intinya adalah forum tersebut secara resmi terorganisasi dan pertemuan yang dilakukan secara teratur, dimana terdiri dari lembaga publik, swasta, NGO dan non-state. (Meier & O'Toole Jr, 2002) menyatakan bahwa keberhasilan program ditekankan pada proses kolaborasi dilakukan dengan kontrol formal. Yang dimaksud dengan kontrol formal adalah bisa berupa forum dimana hal tersebut secara resmi terorganisasi dan melakukan pertemuan secara teratur.

Dalam kolaborasi kegiatan CSR Eliminasi TB di Kabupaten Gresik telah terlaksana forum diantara para stakeholder dan terdapat beberapa pertemuan rutin untuk melakukan pelatihan. forum terbatas dalam kolaborasi kegiatan CSR Eliminasi TB di Kecamatan Roomo Kabupaten Gresik terlaksana beberapa kali dan pertemuan rutin pelatihan rutin digelar, agar masyarakat bisa menerapkan pola hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari, sehingga target eliminasi TB nol persen pada 2028. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, PT.Smelting, Human Initiative maupun masyarakat mengadakan karena pada dasarnya fokus dari kolaborasi ini ialah kesembuhan pasien TB dan umumnya apabila menemukan temuan menjadi hal yang berpengaruh besar maka akan segera ada perbaikan, misal memperkuat stakeholder engagement dengan pihak-pihak pemerintah daerah. Terkait dengan keterlibatan dalam mengelola program CSR Eliminasi Tuberkulosis sejalan dengan yang disampaikan oleh (Molla et al., 2021) terdapat lima atribut penting dari kemitraan antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Yang pertama adalah terkait *Shared aims*, yang melibatkan saling percaya, sejajar, dan resiprositas. Yang kedua adalah *Trust*, di mana organisasi yang berpartisipasi memiliki keyakinan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Atribut ketiga adalah resiprositas, di mana terdapat manfaat dari proses kolaborasi. Atribut keempat adalah *equity*, di mana keadilan dan kekuasaan bersama tercipta. Atribut kelima adalah *shared funding*, yang memerlukan komitmen dan transparansi. Dalam kegiatan CSR Eliminasi TB di Kecamatan Roomo Kabupaten Gresik berlandaskan pada beberapa peraturan yang mendukung adanya kerjasama. Peraturan tersebut diantaranya adalah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Gresik. transparansi proses pada kolaborasi dengan adanya evaluasi yang dilakukan Human Initiative. Dengan berlandaskan aturan tersebut kolaborasi kegiatan CSR Eliminasi TB di Kabupaten Gresik dibuat.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa desain kelembagaan dari kolaborasi kegiatan CSR Eliminasi TB di Kabupaten Gresik telah terlaksana dengan baik. Adanya forum terbatas, kolaborasi telah berjalan berdasarkan partisipasi, aturan dasar dan transparansi.

Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan ialah seorang fasilitator untuk bisa merangkul dan melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat supaya proses kolaborasi dapat berjalan sesuai harapan. Menurut Ansell dan Gash dalam (Molla et al., 2021) pimpinan lembaga kolaboratif ialah seorang pemimpin fasilitatif yang sanggup memfasilitasi seluruh stakeholder untuk terlibat dalam kolaborasi dan duduk bersama di meja perundingan.

Sasaran pada indikator ini ialah bagaimana Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebagai fasilitator sosialisasi antara PT. Smelting dan Human Initiative dengan Warga sekitar. Karena kepemimpinan dalam konteks kolaboratif berperan sebagai fasilitator dialog antar stakeholders, memastikan integritas dalam membangun konsensus, mediator dalam proses negosiasi, dan bekerja sesuai kapasitasnya.

Collaborative Governance sering melibatkan tingkat konflik dan ketidakpercayaan yang tinggi di antara pemangku kepentingan. Namun, biasanya terdapat keinginan yang kuat untuk berpartisipasi di antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk diterima dan dipercayai oleh para pemangku kepentingan dan berfungsi sebagai mediator yang dapat diandalkan dalam kerjasama tersebut. Kepemimpinan yang kuat yang dipercayai oleh semua pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan kerjasama. Kepemimpinan dalam program Penghapusan TB melalui CSR di Kabupaten Gresik adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang melibatkan lembaga publik, swasta, dan NGO untuk turut ikut dalam kolaborasi. Masyarakat dilibatkan dalam program ini dengan diundang Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik untuk menghadiri sosialisasi. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan secara detail seperti apa saja yang akan dilakukan, Pemberian Paket Gizi, Renovasi Ventilasi, Peningkatan kapasitas Kader, Pendampingan PHBS, Advokasi pasien, bersedia mendampingi pasien dari awal hingga akhir kegiatan. Menurut penjelasan (Molla et al., 2021) kepemimpinan dalam *Collaborative Governance* harus menjadi fasilitator yang dapat mengumpulkan semua pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan melakukan pertemuan. Pemimpin tersebut harus membantu membangun kepercayaan, komitmen, dan konsensus di antara para pemangku kepentingan untuk mengembangkan rencana strategis, peta jalan, visi, misi, dan tujuan bersama. Sebagai pemimpin yang fasilitatif, mereka harus menggunakan posisinya untuk berkomunikasi dan terlibat dalam dialog

dengan semua pihak yang terlibat, menghubungkan antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.



Gambar 2. Penghargaan CSR Awarding PT. Smelting dari Pemda Kabupaten Gresik

Sebelum adanya inisiasi Program kegiatan CSR Eliminasi TB di Kabupaten Gresik, belum ada yang bersedia untuk melakukan sosialisasi TB, pembentukan kader kesehatan, pelatihan PHBS dan pendampingan pasien TB dari awal hingga selesai. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan fasilitatif dalam program CSR Eliminasi TB di Kabupaten Gresik telah terlaksana dengan sangat baik.

Proses kolaboratif

Dalam indikator ini sasaran yang dimaksud adalah untuk mengetahui bagaimana proses atau tahapan kolaborasi. Dalam hal ini proses kolaborasi yang dilakukan memerhatikan beberapa hal, yakni bagaimana membangun komunikasi antar pelaku kolaborasi, bagaimana membangun kepercayaan antar stakeholders yang terlibat kolaborasi, bagaimana membangun komitmen antar stakeholders, bagaimana pemahaman terkait misi dan masalah yang dihadapi serta mengidentifikasi nilai-nilai bersama dalam kolaborasi, dan terakhir bagaimana meraih kesuksesan awal, melakukan perencanaan strategis, dan menemukan fakta secara bersama-sama. Proses kolaborasi ini menggambarkan perkembangan bertahap dalam kolaborasi dengan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan program kolaborasi dilaksanakan yang diikuti oleh seluruh anggota yang terlibat. Sehingga keberhasilan kolaborasi tergantung pada bagaimana siklus kolaborasi itu berputar.

Dialog tatap muka pada program kegiatan CSR Eliminasi TB telah terjalin dengan baik bahkan sejak awal kegiatan. Melalui sosialisasi dan penyuluhan. Pada saat sosialisasi dan penyuluhan, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik beserta PT. Smelting dan Human Initiative menerangkan kepada masyarakat terkait hal-hal kegiatan CSR Eliminasi TB dengan jelas dan detail. Tidak hanya itu, ada pertemuan rutin yang dilakukan, Seluruh stakeholder yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, PT. Smelting, dan Human Initiative membentuk FGD atau *Focus Group Discussion*. FGD ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi pada saat kegiatan, Sudah terlaksana sejak awal pada saat Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik bersama PT. Smelting, Human Initiative mensosialisasikan kegiatan Program CSR Eliminasi TB. Selain itu, dialog tatap muka juga terjalin melalui FGD atau *Focus Group Discussion*. Dalam FGD, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, PT. Smelting, Human Initiative dan Pihak swasta lain berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. FGD dibentuk karena untuk mengajak stakeholder terkait peduli TB.

Kepercayaan menjadi kunci bagi keyakinan para aktor dan harapan bersama di antara niat baik para stakeholder yang terlibat. Selain daripada itu kepercayaan yang dirasakan oleh peserta dapat mempengaruhi komitmen mereka pada proses kolaborasi, yang pada akhirnya memiliki keterkaitan untuk keluaran produk dan hasil (Islamy & Andriani, 2022). Kepercayaan dalam program kegiatan CSR Eliminasi TB terbangun melalui apa yang diucapkan sejalan dengan yang dilakukan. Sehingga stakeholder yang terlibat dapat memahami kegiatan apa yang akan direncanakan bersama. Pada saat menjalankan Program CSR Eliminasi TB di Kabupaten Gresik, antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, PT. Smelting, Human Initiative dan Masyarakat terdapat beberapa cara dalam membangun kepercayaan. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik menaruh penuh kepercayaan kepada PT. Smelting mengenai program CSR Eliminasi TB, untuk membina para kader kesehatan TB dan mendampingi pasien hingga berhasil sembuh. PT. Smelting membangun kepercayaan dalam kegiatan CSR Eliminasi TB di Kabupaten Gresik dengan cara sepenuh hati dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kepercayaan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, PT. Smelting, Human Initiative serta masyarakat telah terbangun dengan caranya masing-masing. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik mempercayakan PT. Smelting untuk membantu dan mendampingi pasien selama kegiatan CSR Eliminasi TB, pembentukan kader kesehatan, pelatihan PHBS dan pendampingan pasien TB dari awal hingga selesai. Sedangkan PT. Smelting dan masyarakat membangun kepercayaan tersebut dengan melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh, dan semangat supaya tidak mengecewakan banyak orang. Dengan demikian *trust building* pada proses kolaborasi kegiatan CSR Eliminasi TB sudah terbangun dengan baik. Karena seluruh stakeholder telah membangun kepercayaannya masing-masing. Menurut penjelasan (Molla et al., 2021) Proses kolaborasi terdiri dari tiga tahap: penentuan masalah, penentuan arah, dan implementasi. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan kolaborasi, sehingga kami memulai analisis dari dialog tatap muka, menumbuhkan komitmen, saling pemahaman, dan hasil sementara. Kolaborasi melibatkan pendekatan berbasis dialog, berdiskusi dengan masyarakat dan manajemen, dan membangun kepercayaan, yang semuanya merupakan elemen penting dalam mencapai keberlanjutan.

Komitmen yang dibangun dalam CSR Eliminasi TB di Kabupaten Gresik adalah dengan menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing dengan baik. Seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik berkomitmen dengan selalu membantu memberi arahan dan ijin yang dibutuhkan masyarakat maupun PT. Smelting pada saat kegiatan berlangsung. Begitu juga Human Initiative, dalam program ini mereka tunjukkan dengan menghormati dan menjalankan kewajibannya supaya berhasil melakukan pendampingan pasien dan membagikan bantuan dengan bagus dan sesuai dengan rencana awal program CSR Eliminasi TB. Komitmen dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, PT. Smelting, Human Initiative dan masyarakat telah terbangun. Seluruh stakeholder membangun komitmen dengan melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Dimana Dinas Kesehatan bertugas sebagai fasilitator yang mana

berkomitmen mendukung jalannya kolaborasi dengan memberikan perijinan dan arahan yang dibutuhkan Human Initiative maupun PT. Smelting. Human Initiative berkomitmen dengan Pemberian Paket Gizi, Renovasi Ventilasi, Peningkatan kapasitas Kader, Pendampingan PHBS, Advokasi pasien, bersedia mendampingi pasien dari awal hingga akhir kegiatan. Dan terakhir PT. Smelting membantu dan mendampingi pasien beriringan dengan Human Initiative.

Berbagi pemahaman tentang permasalahan yang ada antar peserta kolaborasi dapat menjadikan kegiatan kolaborasi lebih efektif (Islamy & Andriani, 2022). Kolaborasi yang efektif dengan membangun pemahaman bersama melalui sharing antar pihak dan memberikan sebuah alternatif pemecahan masalah, pemahaman ini akan membentuk suatu mekanisme pengambilan keputusan yang efektif. Selama Program CSR Eliminasi TB di Kabupaten Gresik, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, PT. Smelting, Human Initiative, lintas sektor, dan masyarakat berbagi pemahaman bersama mengenai masalah yang mereka hadapi. Melalui *Focus Group Discussion* (FGD), Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, PT. Smelting, serta seluruh stakeholder terkait berbagi kesepahaman mereka tentang masalah yang mereka hadapi. Karena FGD dibentuk untuk menyelesaikan masalah atau kendala yang terjadi.

Menurut (Ansell & Gash, 2008) kolaborasi terjalin saat tujuan dan keuntungan dari kolaborasi bersifat nyata dan sangat memungkinkan terjadinya “*small wins*” atau harapan jangka pendek. *Small wins* sangat penting dalam sebuah kolaborasi, karena akan memotivasi dan membuat inovasi oleh aktor yang terlibat kolaborasi. Hasil sementara merupakan output dari sebuah kegiatan usaha yang diukur dalam waktu singkat dan merupakan bagian dari indikator hasil jangka panjang. Pada saat kegiatan CSR Eliminasi TB di Kabupaten Gresik, yang diharapkan dalam kegiatan tersebut utamanya adalah kesembuhan pasien TB di Kabupaten Gresik serta terbentuknya kesadaran masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat dan sadar akan bahaya penyakit TB. Meskipun harapan dari program CSR Eliminasi belum sepenuhnya tercapai, tetapi hasil pada kolaborasi ini berupa meningkatnya kesembuhan masyarakat sehingga berkurang pasien pengidap TB di Kabupaten Gresik dan mengurangi jumlah pasien nasinal serta menumbuhkan kebiasaan hidup sehat.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses program pada kegiatan CSR Eliminasi TB di Kabupaten Gresik telah terlaksana dengan baik. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, PT. Smelting, Human Initiative, dan masyarakat telah melaksanakan dan mengimplementasikan dialog tatap muka, kepercayaan, komitmen, kesepahaman, serta hasil sementara dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan diskusi ini, studi ini menyimpulkan bahwa dalam program *CSR Eliminasi Tuberkulosis* di Kabupaten Gresik dalam perspektif *Collaborative Governance* menunjukkan tahapan yang baik serta berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kegiatan dialog tatap muka yang dilakukan yang memiliki potensi baik untuk mendukung proses kolaboratif, komitmen para pemangku kepentingan maksimal telah meningkatkan daya kolaborasi program *CSR Eliminasi Tuberkulosis* di Kabupaten

Gresik. Dialog tatap muka juga memiliki hubungan erat dengan upaya membangun kepercayaan, terutama program *Corporate Social Responsibility Eliminasi Tuberkulosis*. Oleh karena itu, upaya membangun kepercayaan harus terus dilakukan agar kepercayaan dapat benar-benar tumbuh secara optimal. program *Corporate Social Responsibility Eliminasi Tuberkulosis* adalah media untuk mengumpulkan berbagai kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai “win-win solution” karena saling ketergantungan. Oleh karena itu, visi bersama yang dibagikan oleh berbagai pemangku kepentingan di program *CSR Eliminasi Tuberkulosis* merupakan salah satu komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam hal ini, kepemimpinan fasilitatif memiliki peran besar dalam membangun komitmen terhadap *Collaborative Governance*. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran strategis dalam mengundang sektor swasta untuk terlibat dalam Forum *CSR Eliminasi Tuberkulosis*. Hal ini karena pemahaman dunia bisnis terhadap peraturan yang ada, terutama terkait dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Gresik, yang mengharuskan keterlibatan komunitas bisnis dalam kegiatan Forum CSR. Meskipun peraturan tersebut telah menetapkan secara rinci tentang prosedur dunia bisnis dalam melaksanakan CSR mulai dari perencanaan hingga pelaporan kegiatan. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk mekanisme penghargaan bagi bisnis yang memiliki partisipasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA:

- Anggara, S. (2015). *Metode penelitian administrasi*. CV Pustaka setia.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan, edisi kelima. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Beritajatim. (2021, September 10). *Kualitas Udara Gresik Jadi Sorotan*. Beritajatim.Co. <https://beritajatim.com/peristiwa/kualitas-udara-gresik-jadi-sorotan/>
- Development, W. B. C. for S. (1999). *Corporate social responsibility: Meeting changing expectations*. World Business Council for Sustainable Development.
- Dr.farida Nugrahani, M. H. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. 1(1), 38–42. <http://ejournal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdp/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Habibah, E. N. (2021). *Collaborative Governance; Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah*. Pustaka Rumah Cinta.
- Islamy, L. O., & Andriani, R. (2022). Collaborative Governance Process Of Village Fund Management. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 1–23.
- Kemenperin. (2018, March 9). *Kemenperin: Kawasan Industri di Gresik Berpotensi Serap Investasi Rp 83,2 Triliun*. Kemenperin.Go.Id. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/18920/Kawasan-Industri-di-Gresik-Berpotensi-Serap-Investasi-Rp-83,2-Triliun>
- Meier, K. J., & O'Toole Jr, L. J. (2002). Public management and organizational performance: The effect of managerial quality. *Journal of Policy Analysis and Management: The Journal of the Association for Public Policy Analysis and*

Management, 21(4), 629–643.

- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative governance dalam pengelolaan kampung wisata praiijing di desa tebara kecamatan kota waikabu-bak kabupaten sumba barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148.
- Republik Indonesia. (2019). PERPRES 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi (Jawa Timur). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 1, 1–5. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, A. R. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspekit Publik*, 161.
- Susanto, A. B. (2009). Reputation-driven corporate social responsibility Pendekatan strategic management dalam CSR. *Jakarta: Erlangga*.
- Tambunan, T. (2001). *Transformasi ekonomi Indonesia: teori & penemuan empiris*. Salemba Empat.